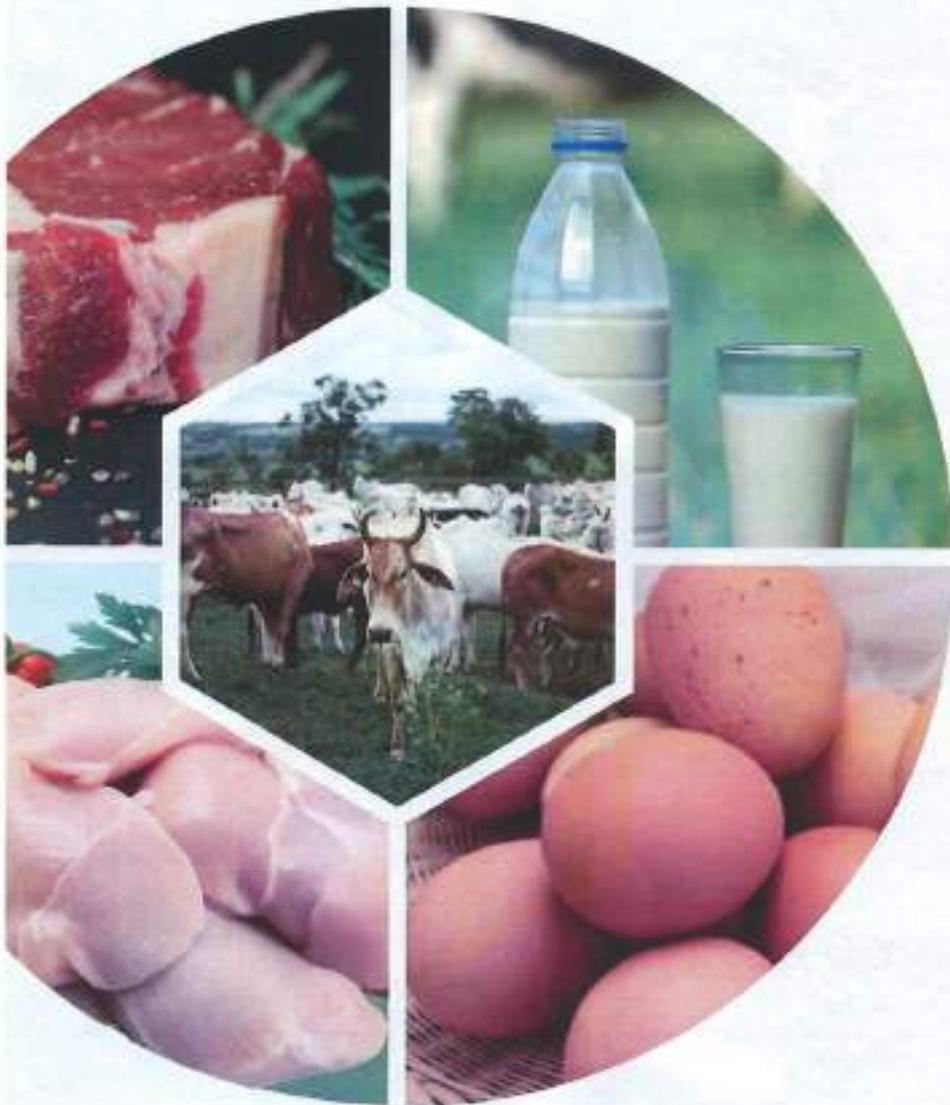




**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **2024**

## **LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**





## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024" dapat terselesaikan. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 menyampaikan hasil pelaksanaan Program/Kegiatan sebagai penjabaran dalam Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Laporan Tahunan ini menginformasikan gambaran umum capaian kinerja makro subsektor peternakan dalam mendukung perekonomian nasional sebagai hasil pelaksanaan program/ kegiatan peternakan dan kesehatan hewan. Capaian indikator kinerja tersebut antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), Kinerja Ekspor, Investasi dan Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT). Selain itu, juga menginformasikan populasi dan produksi komoditas peternakan, kinerja pendukungnya sebagai dukungan pada aspek ketahanan pangan asal hewan, serta pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan selama tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis 2020-2024.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas Laporan Tahunan di masa mendatang. Semoga Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Direktur Jenderal,

Dr. drh. Agung Suganda, M.Si  
NIP. 197611252003121001





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>5</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>7</b>
1.1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	8
1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	9
1.3. Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	10
1.4. Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	14
1.5. Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	16
1.6. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	19
<b>BAB II KINERJA MAKRO PETERNAKAN</b> .....	<b>23</b>
2.1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan.....	24
2.2. Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	25
2.3. Nilai Tukar Petani Peternakan .....	26
2.4. Penyerapan Tenaga Kerja Subsektor Peternakan.....	27
2.5. Populasi dan Produksi Peternakan .....	28
<b>BAB III KINERJA PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024</b> .....	<b>31</b>
3.1. Fasilitas Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging.....	32
3.2. Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	42
3.3. Penghargaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024.....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Rekomendasi.....	64
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024.....	13
Tabel 2	Rekapitulasi Rincian Anggaran per Jenis Kewenangan dan Belanja Tahun 2024.....	18
Tabel 3	Rekapitulasi Rincian Anggaran per Kegiatan Utama Tahun 2024.....	19
Tabel 4	Capaian Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023-2024.....	25
Tabel 5	Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 6	Populasi Ternak Nasional Tahun 2023-2024.....	28
Tabel 7	Produksi Daging Tahun 2020-2024 .....	29
Tabel 8	Produksi Susu Tahun 2020-2024.....	29
Tabel 9	Produksi Telur Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 10	Rekapitulasi Progres Investasi Sapi dan Sapi Pedaging per 30 Desember 2024.....	36
Tabel 11	Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024 Berdasarkan Kewenangan	42
Tabel 12	Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024 Berdasarkan Jenis Belanja .....	43
Tabel 13	Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024 Berdasarkan Kegiatan ...	43
Tabel 14	Capaian Kegiatan Pengembangan HPT Tahun 2024.....	44
Tabel 15	Target dan Realisasi Kegiatan Layanan Optimalisasi Reproduksi Tahun 2024.....	52
Tabel 16	Target dan Realisasi Produksi Benih Ternak Tahun 2024.....	53
Tabel 17	Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2024.....	58





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alokasi Anggaran Ditjen PKH TA.2024.....	18
Gambar 2	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024.....	20
Gambar 3	Sumber Daya Manusia Ditjen PKH Tahun 2024.....	21
Gambar 4	Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian dan Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024.....	24
Gambar 5	Nilai Tukar Petani Peternakan Tahun 2020-2024.....	26
Gambar 6	Tenaga Kerja Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024.....	27
Gambar 7	UPT Penerima SNI Award 2024.....	60
Gambar 8	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024...	61
Gambar 9	Bhumandala Award 2024.....	61

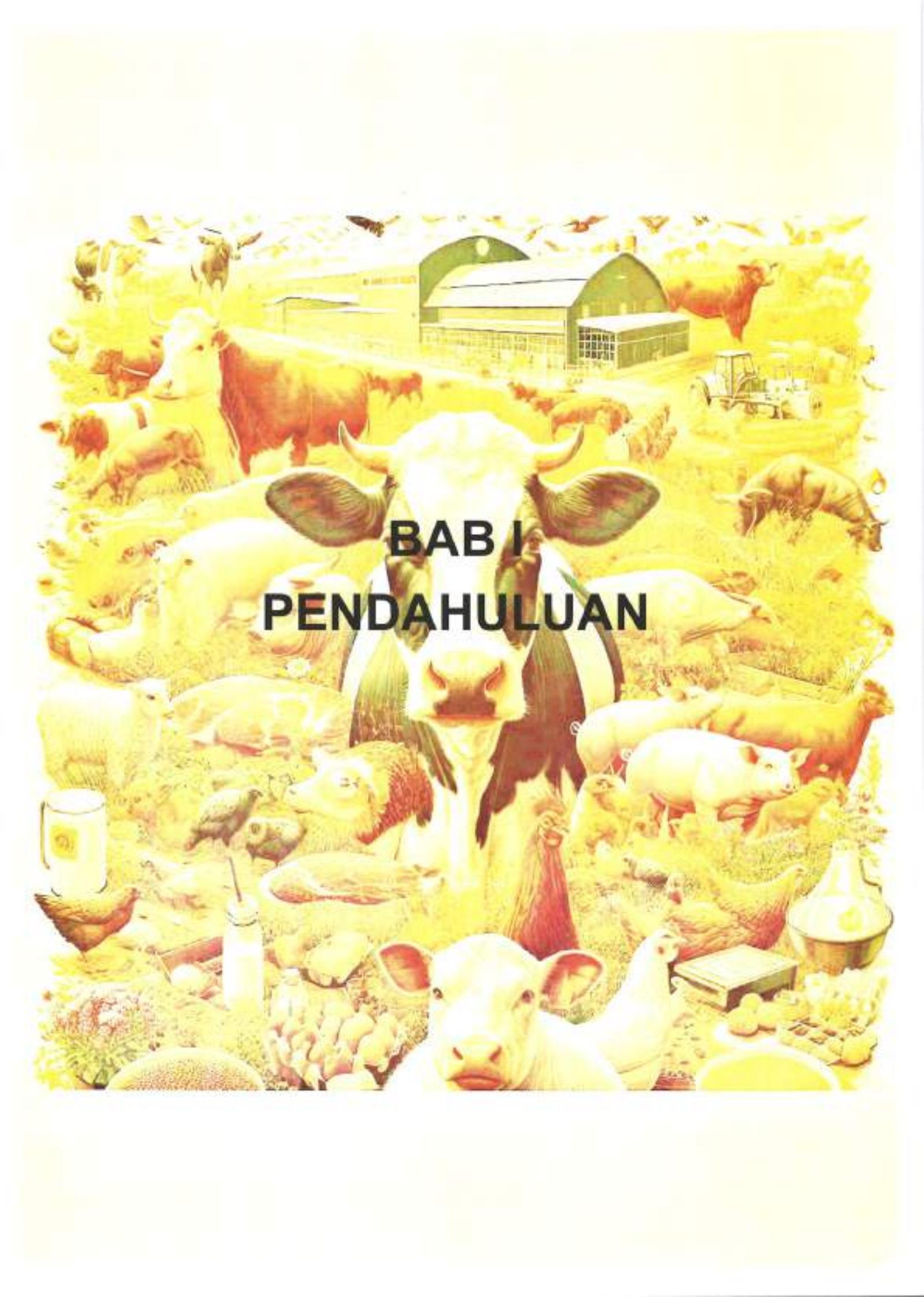




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun 2024.....	67
Lampiran 2	Capaian Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun 2024.....	68
Lampiran 3	Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2024.....	70
Lampiran 4	Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024.....	72
Lampiran 5	Capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024.....	73
Lampiran 6	Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2024.....	74





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



1.1.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sesuai dengan arahan Presiden yang menjelaskan bahwa hanya ada visi dan misi presiden dan wakil presiden, maka Kementerian dan Lembaga dalam perumusan visi dan misi-nya, harus selaras dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden dalam RPJMN 2020-2024, untuk visi yaitu:

*"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"*

Selanjutnya untuk menyelaraskan dan mendukung visi pemerintah tersebut maka visi Kementerian Pertanian mendukungnya dengan:

*"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".*

Selaras dengan kedua visi di atas, Ditjen PKH sebagai salah satu Eselon I di bawah Kementan merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

**"Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern"**

Visi

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit dan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.</li> <li>2. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing</li> <li>5. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat</li> <li>6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional dan modern</li> </ol> |
|---|---|

Misi





1.2.

**Arah Kebijakan dan Strategi  
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Peternakan yang sesuai dengan *Good Breeding* dan *Good Farming Practices*

*Good Breeding Practices* dan *Good Farming Practices* adalah pelaksanaan usaha peternakan di bidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standard yang berlaku. *Good Breeding Practices* dan *Good Farming Practices* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.





### 3. Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan hygiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

### 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tata laksana, area penataan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Strategi pelaksanaan dilakukan melalui optimasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

#### 1.3.

#### Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan



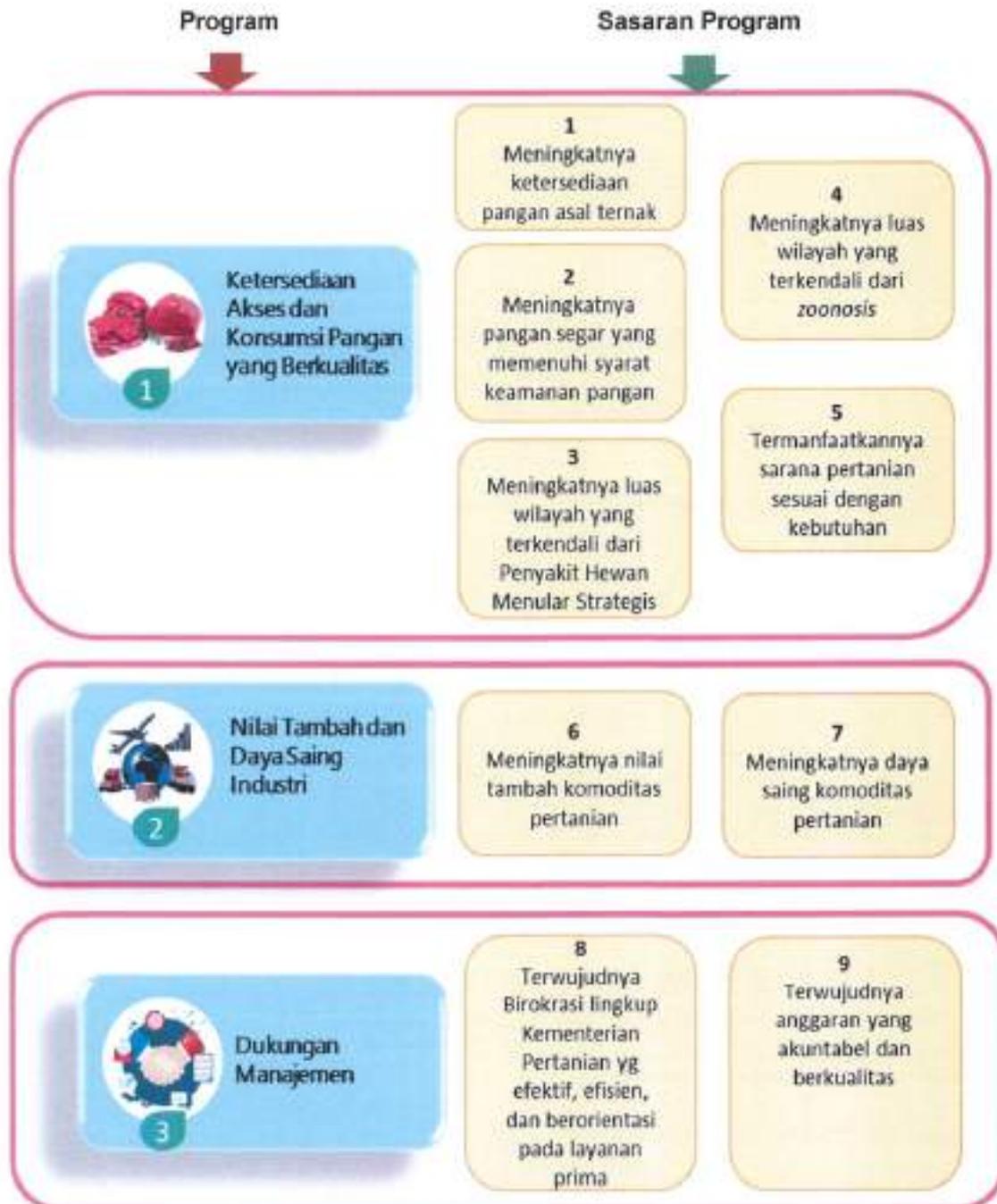


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana terurai diatas, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:





Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diimplementasikan dalam 3 (tiga) program yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2020, sebagai barometer capaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 2020 – 2024.



Sumber: Rencana Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Revisi 2, 2022





Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tertuang dalam Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Revisi II), yaitu: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, 2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta 3) Program Dukungan Manajemen.

Tabel 1. Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,85	1,20	1,24	1,28
		Peningkatan produksi susu	%	0,56	0,61	0,71	0,85
		Peningkatan produksi telur	%	2,15	2,16	2,16	2,16
	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	85,20	85,50	85,70	86,00
	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus zoonosis	Persentase wilayah yang terkendali zoonosis	%	74,00	74,50	75,00	76,00
	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80,50	80,50	81,00	81,00
	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	Tingkat pemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan	%	91,25	92,25	93,50	94,50
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	Tingkat pemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	87,00	90,00	92,00	95,00
	Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%	15,00	20,00	25,00	30,00
Dukungan Manajemen	Tenwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75	33,50	34,00	35,50
	Tenwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68	88,93	90,32	90,85

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Revisi II)





1.4.

Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kegiatan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

1

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (1 Kegiatan)
- Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan (4 NSPK)
- Hijauan Pakan Ternak (10 Unit)
- Pakan Olahan dan Bahan Pakan (10 Unit)
- Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan (300 Produk)
- SBSN Prasarana Pusat Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Bekasi (1 Unit)

2

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan (2 Kegiatan)
- Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan (7 NSPK)
- Layanan Kesehatan Hewan (4.045.677 Layanan)
- Obat Hewan dan Bahan Biologik yang diproduksi (1.456.693 Layanan)
- Hasil Uji Mutu Obat Hewan (600 Produk)
- Sampel Penyakit Hewan yang Teramati dan Teridentifikasi (115 Sampel)
- Sarana Bidang Kesehatan Hewan (2 Unit)
- SBSN Sarana Laboratorium BVet Medan (1 Unit); BVet Lampung (1 Unit) dan BVet Banjarbaru (1 Unit)
- SBSN Prasarana Laboratorium BVet Medan (1 Unit); BVet Lampung (1 Unit) dan BVet Banjarbaru (1 Unit)
- Prasarana Bidang Kesehatan Hewan 1 Unit





### 3 Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak (1 Kegiatan)
- Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak (5 NSPK)
- Ternak Yang Didata dan Ditandai (1.000.000 Unit)
- Benih Ternak Unggul (2.817.674 Produk)
- Bibit Ternak Unggul (200.000 Produk)
- Layanan Optimalisasi Reproduksi (1.287.801 Layanan)
- Ternak Ruminansia Potong (800 Ekor)
- Ternak Unggas dan Aneka Ternak (4.000 Ekor)
- Ternak Unggas dan Aneka Ternak (MP FE) (6.000 Ekor)
- Sarana Perbibitan Ternak (10 Unit)
- Prasarana Perbibitan Ternak (1 Unit)
- SBSN Sarana Breeding Center Sapi Potong Indonesia (1 Unit)
- SBSN Prasarana Breeding Center Sapi Potong Indonesia (1 Unit)

### d Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (1 Kegiatan)
- Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner (6 NSPK)
- Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (2.500 Produk)
- Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner (4 Unit)





**e**

**Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan**

- Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (4 Kegiatan)
- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (3 NSPK)
- Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (44 Lembaga)
- Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (45 Unit)
- Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (42 Unit)

**f**

**Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya**

- Layanan BMN (136 Layanan)
- Layanan Hukum (1 Layanan)
- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (5 Layanan)
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (23 Layanan)
- Layanan Umum (2 Layanan)
- Layanan Data dan Informasi (39 Layanan)
- Layanan Perkantoran (47 Layanan)
- Layanan Sarana Internal (14 Layanan)
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran (410 Dokumen)
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi (69 Dokumen)
- Layanan Manajemen Keuangan (248 Dokumen)

**1.5.**

**Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Pagu anggaran awal Program/Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 sebesar Rp2.543.051.794.000,00 (*dua triliun lima ratus empat puluh tiga miliar lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*). Sejalan dengan adanya berbagai dinamika kebijakan eksternal dan internal dalam mendukung prioritas pembangunan, terdapat perubahan pagu anggaran, yaitu:

1. Revisi I yaitu relokasi anggaran sebesar Rp1.635.201.943.000,00 dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung T.A. 2024 sehinggal pagu Ditjen PKH setelah Revisi I sebesar Rp907.849.851.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-8/AG/Ag.3/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024.



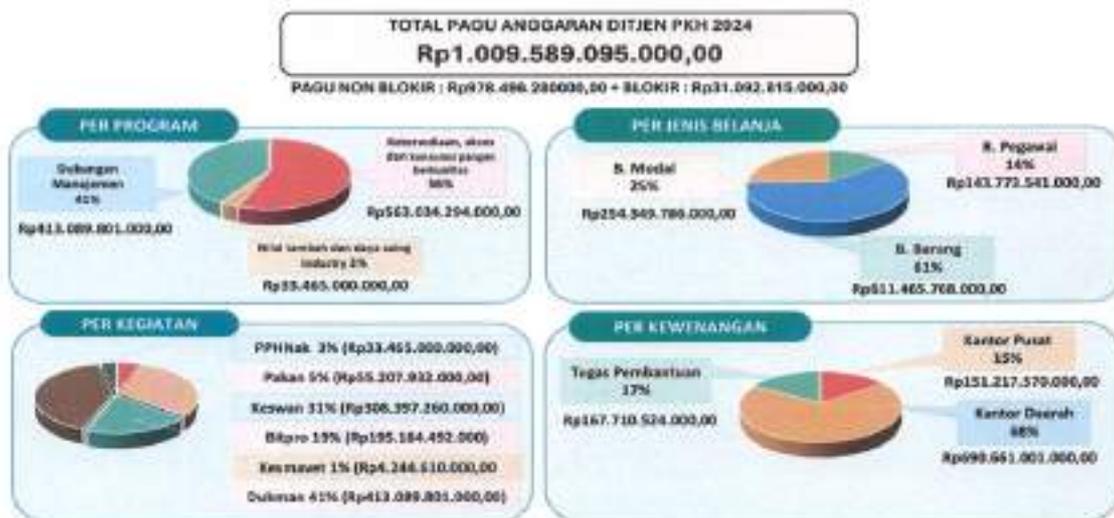


2. Revisi II yaitu Revisi Pencantuman Blokir Automatic Adjustment pada Catatan Halaman IV.A DIPA sebesar Rp28.693.545.000 dan Pembukaan Blokir Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah (akun 526) T.A. 2024 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi II sebesar Rp 907.849.851.000,00. Revisi DIPA Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-44/AG/Ag.3/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024.
3. Revisi III yaitu Pembukaan Blokir Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah (akun 526) T.A. 2024 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi III sebesar Rp929.988.457.000,00.Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-175/AG.AG.3/2024 tanggal 14 Februari 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024.
4. Revisi IV yaitu Revisi Buka Blokir, Pergeseran SBSN dan Belanja Operasional sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi IV sebesar Rp930.761.790.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-324/AG/AG.3/2024 tanggal 14 Mei 2024hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024.
5. Revisi V yaitu Revisi Pergeseran anggaran SBSN dan Operasional Perkantoran sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi V sebesar Rp957.556.673.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-486/AG/AG.3/2024 tanggal 10 Agustus 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024.
6. Revisi VI yaitu Pergeseran Belanja Operasional antar Eselon I sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VI menjadi Rp989.444.549.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-539/AG/Ag.3/2024 tanggal 2 September 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024.
7. Revisi VII yaitu Revisi SBSN, Pergeseran antar Program dalam Eselon I Revisi sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VII sebesar Rp1.005.887.352.000,00. Revisi DIPA ditetepkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-736/AG/Ag.3/2024 tanggal 4 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun 2024, pagu Ditjen PKH menjadi Rp. 1.009.589.095.000,- atau menurun 60,30% dari pagu awal dengan jumlah pagu blokir sebesar Rp31.092.815.000. Anggaran tersebut dialokasikan pada 62 (enam puluh dua) satuan kerja, dengan rincian 1 (satu) Satker Kantor Pusat, 23 (dua puluh tiga) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan 38 (tiga puluh delapan) Satker Tugas Pembantuan (TP).



Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2024, Ditjen PKH memperoleh alokasi APBN sebesar Rp1.009.589.095.000,00 (*satu triliun sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah*) dengan jumlah blokir anggaran sebesar Rp31.092.815.000,00 (*tiga puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*). Proporsi anggaran terbesar berdasarkan kewenangan terdapat pada Kantor Daerah sebesar Rp690.661.001.000,00 (68,41%). Selanjutnya, proporsi anggaran terbesar berdasarkan jenis belanja terdapat pada Belanja Barang sebesar Rp611.465.768.000,00 (60,57%), dan berdasarkan kegiatan terdapat pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp413.089.801.000,00 (40,92%). Proporsi anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya merupakan proporsi terbesar karena untuk pemenuhan pelayanan teknis minimal pada UPT lingkup Ditjen PKH.



Gambar 1. Alokasi Anggaran Ditjen PKH TA. 2024

Berdasarkan jenis kewenangan, besarnya anggaran Kantor Pusat sebesar Rp.151.217.570.000 (14,98%); UPT PKH sebesar Rp.690.661.001.000 (68,41%); Tugas Pembantuan sebesar Rp.167.710.524.000 (16,61%). Sedangkan berdasarkan jenis belanjanya, anggaran belanja pegawai sebesar Rp.143.773.541.000 (14,24%); belanja barang sebesar Rp.611.465.768.000 (60,57%); belanja modal sebesar Rp.254.349.786.000 (25,19%). Rekapitulasi Rincian Anggaran per Jenis Kewenangan dan Jenis Belanja Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Rincian Anggaran per Jenis Kewenangan dan Belanja Tahun 2024

No	Unit Kerja	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	30.939.651.000	118.891.819.000	1.386.000.000	151.217.570.000
2	UPT PKH	112.833.890.000	324.863.325.000	252.963.786.000	690.661.001.000
3	Tugas Pembantuan	-	167.710.524.000	-	167.710.524.000
	<b>Total</b>	<b>143.773.541.000</b>	<b>611.465.768.000</b>	<b>254.349.786.000</b>	<b>1.009.589.095.000</b>



Anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut: Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar Rp.55.207.932.000 (5,47%); Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar Rp.308.397.260.000 (30,55%); Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp.195.184.492.000 (19,33%); Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp.4.244.610.000 (0,42%); Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar sebesar Rp.413.089.801.000 (40,92%); Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dilaksanakan sebesar Rp.33.465.000.000 (3,31%). Secara rinci Rekapitulasi Rincian Anggaran per Kegiatan Utama Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Rincian Anggaran per Kegiatan Utama Tahun 2024

No	Unit Kerja	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah (Rp)
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	-	33.069.328.000	22.138.606.000	55.207.932.000
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	-	146.399.551.000	161.997.709.000	308.397.260.000
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	-	128.700.646.000	66.483.846.000	195.184.492.000
4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	3.656.771.000	587.839.000	4.244.610.000
5	Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	143.773.541.000	267.930.260.000	1.386.000.000	413.089.801.000
6	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	-	31.709.214.000	1.755.786.000	33.465.000.000
	<b>Total</b>	<b>143.773.541.000</b>	<b>611.465.768.000</b>	<b>254.349.786.000</b>	<b>1.009.589.095.000</b>

## 1.6.

### Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

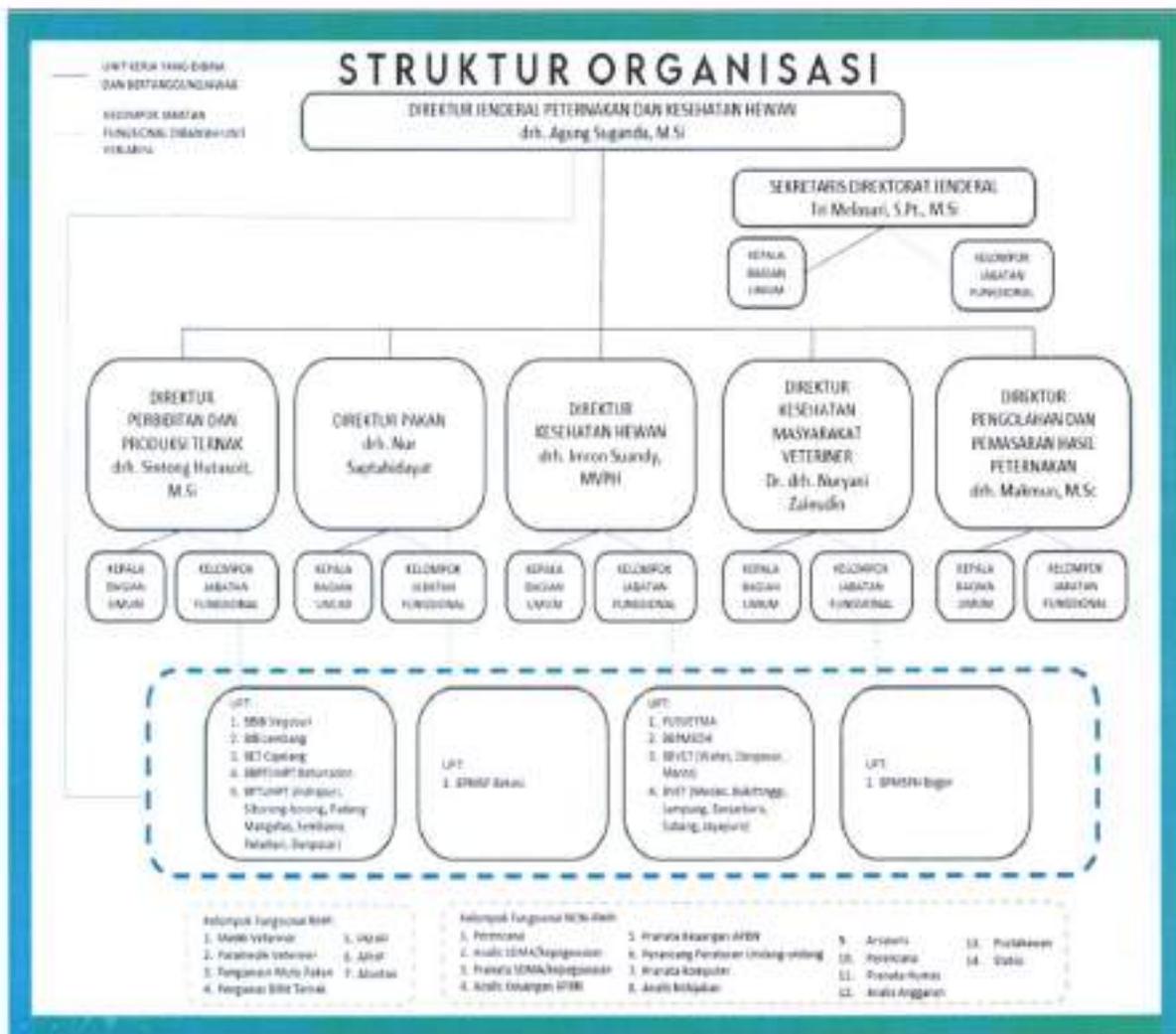
Susunan Organisasi dan Tata Kerja unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 154, dengan susunan organisasi terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal.
- Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
- Direktorat Pakan
- Direktorat Kesehatan Hewan.
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.



Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PKH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2024 disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

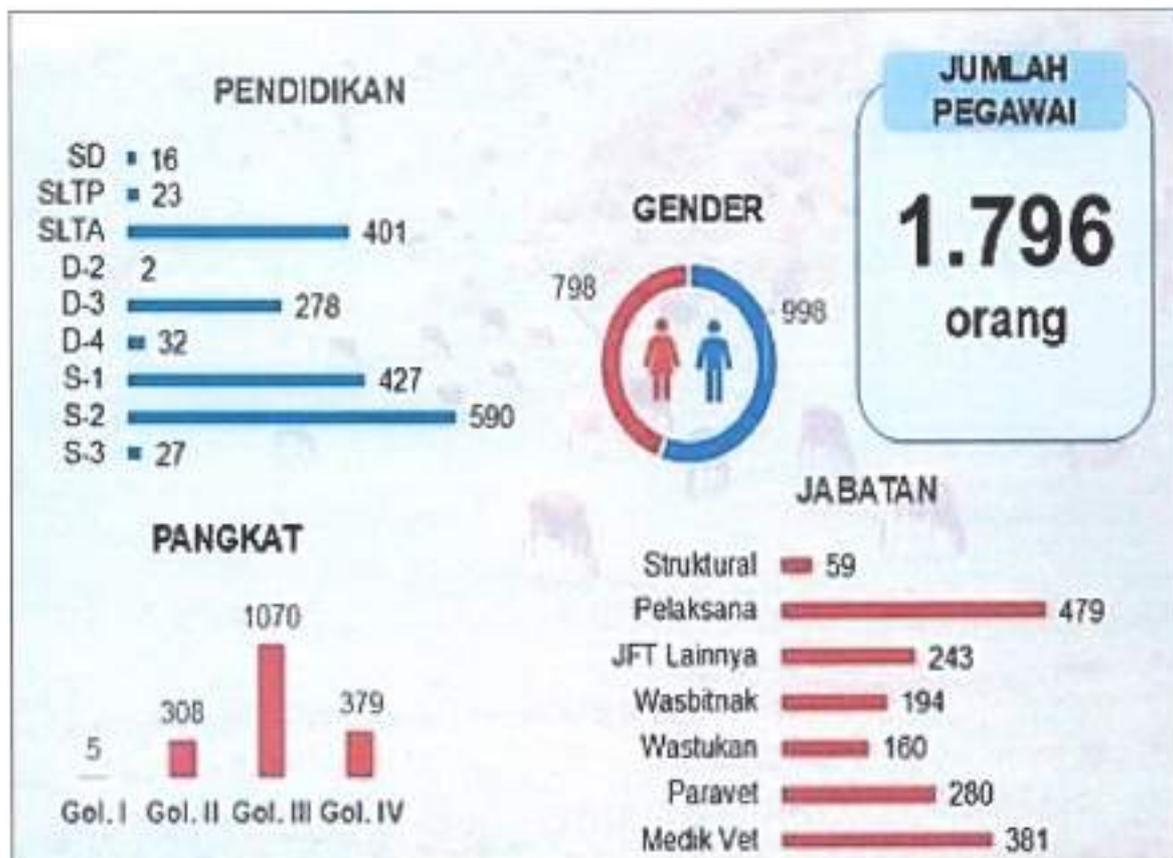


Sumber: Ditjen PKH, 2024



Ditjen PKH dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 1.796 orang pegawai yang tersebar di 1 Kantor Pusat dan 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.762 orang pegawai dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 34 orang pegawai. Klasifikasi pegawai Ditjen PKH sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai di Kantor Pusat dan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
  - a. Jumlah pegawai Kantor Pusat sebanyak 379 orang yang terdiri dari Direktorat Jenderal sebanyak 1 orang; Sekretariat Ditjen sebanyak 118 orang; Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 56 orang; Direktorat Pakan sebanyak 43 orang; Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 69 orang; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 45 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 47 orang.
  - b. Jumlah pegawai UPT sebanyak 1.417 orang yang tersebar pada 23 UPT.

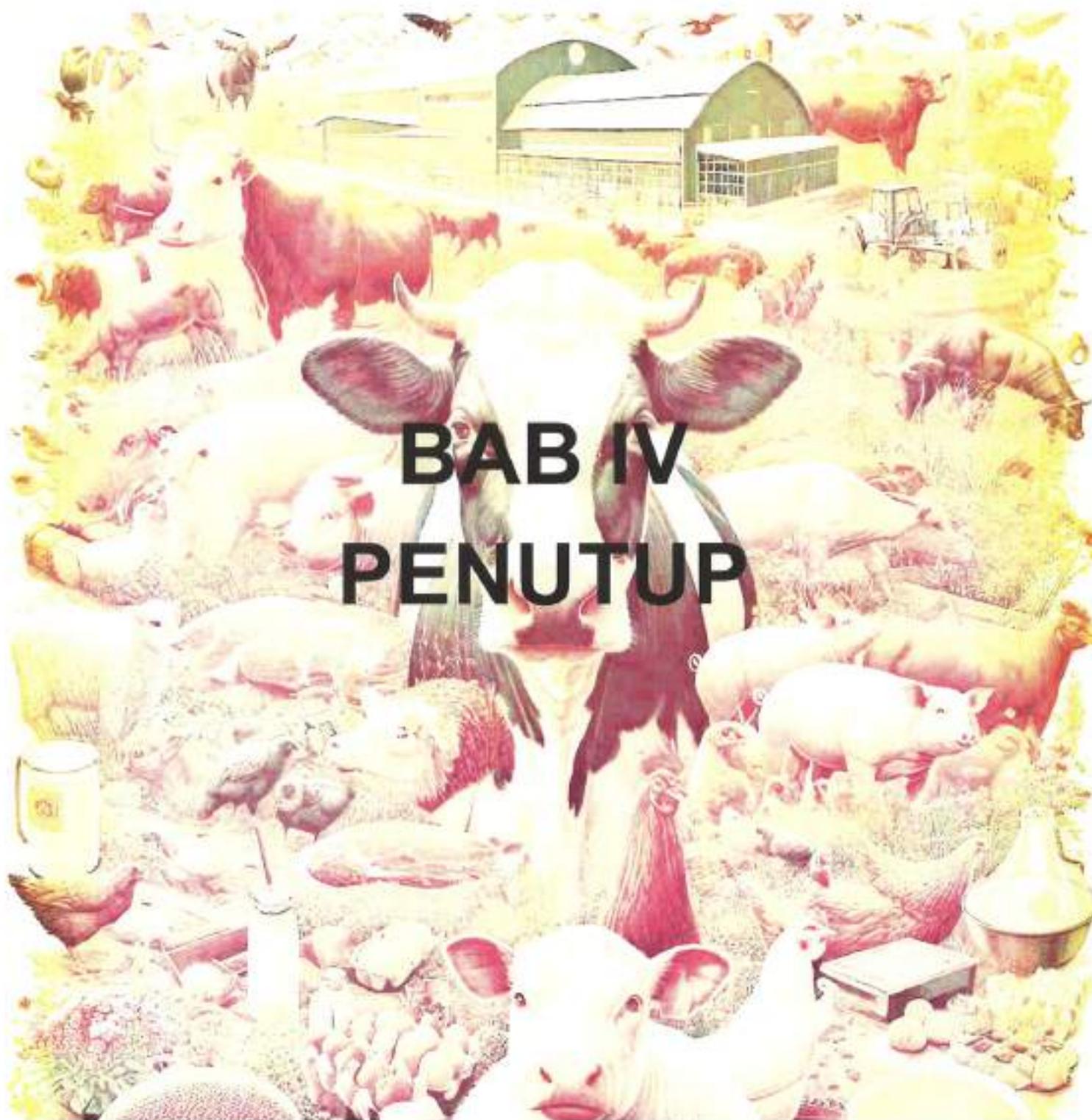


Gambar 3. Sumber Daya Manusia Ditjen PKH Tahun 2024



2. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 998 orang dan perempuan sebanyak 798 orang.
3. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 379 orang; Golongan III sebanyak 1.070 orang; Golongan II sebanyak 308 orang; dan Golongan I sebanyak 5 orang.
4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 27 orang; S-2 sebanyak 590 orang; S-1 sebanyak 427 orang; D-4 sebanyak 32 orang; D-3 sebanyak 278 orang; D-2 sebanyak 2 orang; SLTA sebanyak 401 orang; SLTP sebanyak 23 orang; dan SD sebanyak 16 orang.
5. Jumlah pegawai menurut kelas jabatan: Medik Veteriner sebanyak 381 orang; Paramedik Veteriner sebanyak 280 orang; Pengawas Mutu Pakan sebanyak 160 orang; Pengawas Bibit Ternak sebanyak 194 orang; JFT lainnya sebanyak 243 orang; JFU sebanyak 479 orang; dan Struktural sebanyak 59 orang.
6. Jumlah pegawai Ditjen PKH tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 (1.829 orang) mengalami pengurangan sebanyak 33 orang atau 1,80%. Pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena adanya mutasi pegawai sebanyak 2 orang dan pensiun sebanyak 31 orang.





**BAB IV**  
**PENUTUP**



#### 4.1.

### Kesimpulan

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi pencapaian Program/Kegiatan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Secara umum capaian Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2024 berhasil dilaksanakan. Pada tahun 2024, penyerapan anggaran Ditjen PKH sebesar Rp.962.944.664.118,00 atau setara dengan 95,38% terhadap total pagu anggaran akhir sebesar Rp1.009.589.095.000,00. Jika tanpa memperhitungkan blokir anggaran, pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp978.496.280.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 98,41%, sedangkan capaian output kegiatan pada rentang 83,73% sampai dengan 120%.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya:

1. Sebagian besar kepemilikan ternak untuk ruminasia potong, baik besar maupun kecil adalah peternakan rakyat yang bersifat subsiten dengan kepemilikan 2-3 ekor;
2. Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti *African Swine Fever*, Penyakit Mulut dan Kuku, *Septicaemia Epizootica*, *Surra*, *Avian Influenza*, *Jembrana*, dan *Anthrax* di beberapa wilayah di Indonesia yang berpengaruh terhadap produksi ternak;
3. Masih tingginya struktur ongkos pakan karena adanya keterbatasan lahan untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan tingginya harga bahan baku pakan olahan/konsentrat yang berpengaruh terhadap akses pakan dan nutrisi untuk ternak;
4. Produktivitas ternak masih rendah karena manajemen reproduksi dan pemuliaan belum optimal;
5. Tingginya harga komoditas pangan asal ternak karena jaringan distribusi, Infrastruktur dan akses yang belum memadai;
6. Belum optimalnya penerapan inovasi dan teknologi dalam pengembangan usaha peternakan, terutama sistem pendataan, sistem kesehatan hewan, inovasi pakan, serta sistem produksi;
7. Daya saing produk peternakan masih rendah;
8. Perdagangan bebas;
9. Dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin terbatas.





## 4.2.

### Rekomendasi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Ditjen PKH telah melakukan upaya-upaya dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun intervensi melalui belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan non APBN. Dalam upaya untuk mendukung percepatan peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mewujudkan swasembada pangan asal ternak, maka Ditjen PKH pada tahun 2025 secara berkesinambungan akan terus melakukan berbagai program/kegiatan terobosan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Mendorong pelaksanaan program/kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber, selain Rupiah Murni dan non APBN antara lain: BLU, PNBK, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara, dan hibah luar negeri.
2. Mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dalam mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional.
3. Memperkuat regulasi yang mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional.
4. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* terkait.
5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
6. Mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi untuk Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), terutama percepatan vaksinasi PMK yang saat ini sedang merebak, baik kejadian maupun kasus di lapangan.
7. Menyelesaikan Regulasi Jasa Perkawinan Ternak (JPT) untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan optimalisasi reproduksi di lapangan.
8. Menyusun perubahan mekanisme layanan optimalisasi reproduksi, serta desain lokasi atau pemetaan wilayah IB yang akan dibiayai oleh APBD, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengupayakan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025.
9. Melakukan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan terkait perubahan metode audit sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.





10. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menetapkan POV di seluruh Provinsi/Kab/Kota sesuai PP nomor 34 Tahun 2024.
  - b. Mengembangkan sistem pelaporan Identik Ternak untuk pendataan ternak sapi dan kerbau serta pendataan unggas dan kambing domba.
  - c. Menyusun data prognosa kebutuhan dan ketersediaan berbasis wilayah.
  - d. Optimalisasi peran Dinas Prov/Kab/Kota dan asosiasi perunggasan (PINSAR, GPPU, ARPHUIN, GOPAN, KPUN, dll).
  - e. Mengembangkan sistem pelaporan data secara berjenjang melalui *Poultrynesia* dan *SIPoultry*.
  - f. Menyusun model atau mengembangkan klaster peternakan ayam ras berbasis desa dan kecamatan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
  - g. Mendukung akselerasi penambahan populasi dan pengembangan sapi potong dan sapi perah, utamanya dalam i) Penyediaan informasi lahan yang dapat digunakan serta *clean and clear*; ii) Penyediaan insentif Pajak Daerah yang dapat menarik investor; iii) Peningkatan kapasitas SDM (petani dan peternak, kelompok peternak); iv) Mendorong kelompok peternak sapi untuk dapat berkerja sama dengan mitra kerja atau investor.
  - h. Melakukan identifikasi sekaligus evaluasi terhadap pemanfaatan unit RPH, RPHU dan Puskesmas agar unit yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
  - i. Memfasilitasi Sertifikasi NKV melalui anggaran APBD dan melakukan pelatihan auditor NKV baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
  - j. Membentuk Satgas Kemitraan dan Pembinaan/ Pengawasan Kemitraan dan dapat dialokasikan pada APBD.





**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kementerian Pertanian Gedung C**

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan, 12550

<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>